

BAB III

PENETAPAN KOTA PADANG SEBAGAI IBUKOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Sejarah Kota Padang

Sejarah Kota Padang tidak ada data yang pasti siapa yang memberi nama Kota ini. Diperkirakan Kota ini awalnya hanya berupa lapangan atau dataran yang sangat luas sehingga dinamakan Padang. Dalam bahasa Minang, kata Padang bermaksud Pedang. Menurut tambo setempat, kawasan Kota ini dahulunya merupakan bagian dari kawasan Rantau yang didirikan oleh para perantau Minangkabau dari dataran tinggi Minangkabau (Darek). Tempat pemukiman mereka pertama adalah perkampungan di pinggir Selatan Batang Arau di tempat yang sekarang bernama Seberang Padang.

Sebagai rantau Minangkabau, pada awalnya orang-orang kubung XIII (Solok) yang datang ke Padang, lalu menyusul dari kawasan Luhak Nan Tigo. Padang waktu itu sudah mulai di tempat penduduk asli yang menurut tambo setempat adalah orang-orang Kupit dan Firau.¹

Pada mulanya rantau pesisir ini tidaklah begitu penting karena arus perdagangan Minangkabau mengarah ke Pantai Timur melalui sungai besar yang berhulu di sekitar Gunung Merapi yang menjadi pusat pemukiman. Semenjak Selat Malaka tidak lagi aman dari persinggahan dagang yang keras, setelah orang Portugis dan Spanyol kemudian Belanda dan Inggris ikut meramaikan lalu lintas perdagangan dan menimbulkan peperangan dan

¹ Hasan Basri Durin, *Padang Kota Tercinta*, (Padang: kotak Grafika), 1983, h. 13

pembajakan yang berkepanjangan antara mereka dan dengan kerajaan Aceh dan Malaka, maka arus perdagangan pada waktu itu mulai berangsur-angsur pindah ke Pantai Barat. Aceh adalah kelompok pertama yang meramaikan setelah Malaka di taklukan Portugis mereka menguasai jalan laut Selat Malaka.

Sejak saat itu Muara di sepanjang Pantai Barat tumbuh menjadi sebuah pelabuhan dagang. Sedangkan pelabuhan yang paling penting waktu itu adalah pelabuhan Tiku, Pariaman, dan Inderapura. Pelabuhan tersebut menandai pelabuhan terpenting karena posisi pelabuhan tersebut lebih dekat dengan sumber komoditi perdagangan seperti lada di bagian Utara dan emas di bagian Selatan.

Taktik yang di pakai oleh kompeni adalah menyerahkan upeti kepada Pagaruyuang, untuk menjamin kekuasaannya, kompeni mengangkat orang kaya kecil sebagai penguasa tertinggi di kota Padang, disamping menjadi penasehat kompeni dalam hal-hal yang berkaitan dalam cara-cara berhubungan dengan penduduk dan Raja-raja.

Padang berarti suatu daratan yang cukup luas. Kondisi tersebut menjadi insprirasi bagi lahirnya Kota Padang. Secara topografi Kota Padang daratan rendah yang dikelilingi bukit-bukit yang tidak begitu tinggi. Kota ini bermuara dua batang sungai yaitu Batang Kuranji dan Batang Arau. Pada abad ke-14 di Minangkabau ada sebuah kerajaan di bawah Aditiyawarman. Pada waktu itu Padang hanya di kenal sebagai kampung nelayan atau orang

² *Ibid.*, h. 13-15

menyebutnya kampung Batuang. Waktu itu Kota Padang di perintah oleh Penghulu Delapan Suku dengan menggunakan sistem pemerintahan Nagari.

Pada zaman kerajaan Minangkabau Pagaruyuang dibawah pemerintah Adityawarman pada abad XIV (1340-1375), Padang mulai dikenal sebagai perkampungan nelayan, yang daerahnya disebut “Kampung Batuang” terletak di sekitar daerah Kepala Koto antara Kampung Parak Gadang dengan Kampung Seberang Padang sekarang ini.³

Pada sekitar abad 15 dan 16 kerajaan Aceh dibawah pemerintahan Iskandar Muda. Pesisir Pantai Barat Minangkabau seperti Tiku, Pariaman, Inderapura menjadi daerah pelabuhan termasuk bagi pedagang-pedagang asing. Karena posisi Padang juga sebagai daerah pesisir maka Padang juga sering disinggahi oleh pedagang-pedagang dari daerah lain yang akan terus ke Aceh.

Suku Aceh adalah kelompok pertama yang meramaikan Padang setelah Selat Malaka di taklukan oleh Portugis pada awal abad ke XVI. Sejak saat itu pantai Tiku, Pariaman dan Inderapura yang di kuasai oleh Raja-raja Muda wakil Pagaruyuang berubah menjadi pelabuhan pelabuhan penting karena posisinya dekat dengan sumber-sumber komoditi seperti cengkeh, pala dan emas.⁴

Namun pada masa kerajaan Aceh kejayaannya mulai menurun, hal tersebut karena daerah-daerah yang dikuasai oleh Aceh mulai melepaskan diri. Pada waktu yang bersamaan di Minangkabau dan Indonesia pada umumnya

³R. Batuah, *Padang Pintu Gerbang Pantai Barat Indonesia*, (Padang: Mandala Buana Bhakti, 2002), h. 21-22

⁴ Hasan Basri Durin, *Op.Cit.*, h. 14

mulai beroperasi perusahaan dagang Belanda, usaha dagang Belanda ini di kenal dengan VOC (Verenigde Ost Indische Compagnee).

1. Kota Padang Pada Masa Kolonial Belanda

Hampir sepanjang abad, Padang merupakan Kota metropolitan terbesar di seluruh Pulau Sumatera, selain mempunyai banyak hubungan dengan negara lain Kota ini merupakan Kota pusat kekuatan militer Hindia Belanda, apalagi selama berlangsungnya perang Aceh. Padang merupakan tempat pelarian memadamkan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di tempat lain atau sekedar untuk memperluas daerah kekuasaan Belanda di bagian tengah Pulau Sumatera.⁵

Kolonial datang ke Padang setelah Selat Malaka ditaklukan oleh Portugis pada awal abad ke-16. Kemudian Belanda datang mengincar Padang, karena letak Muara Padang yang bagus dan cukup besar serta udaranya yang nyaman. Belanda berhasil menguasai Padang pada tahun 1660 melalui perjanjian dengan Raja-raja Muara-waki dan Pagaruyuang. Pada tahun 1667, Belanda membuat loji yang berfungsi sebagai gudang sekaligus tangsi, dan daerah sekitarnya dikuasai pula oleh Belanda demi alasan keamanan dan sejak itu Padang menjadi pusat kegiatan VOC untuk Pantai Barat Sumatera Barat. Padang menjadi lebih ramai setelah adanya pelabuhan Teluk Bayur (*Emmahaven*).⁶

Sebelum pelabuhan Teluk Bayur (*Emmahaven*) beroperasi kapal-kapal berlabuh di dekat Pulau Pisanggadang yang terletak di kawasan

⁵ Pemerintah Daerah Sumatera Barat Padang, (*Sumatera Barat 1945-1949*), 1979, h. 11

⁶Gusti Asnan, *Pemerintahn Sumatera Barat Dari VOC Hingga Revormasi*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), h. 9

pantai Air Manis. Kapal-kapal api besar ataupun kapal-kapal layar berukuran samudera tidak dapat memasuki Muara sungai ini. Ombak di sekitar gunung Padang (disebelah kiri Muara Batang Arau) cukup besar, sehingga dapat membahayakan kapal, semua kapal berlabuh di bagian Timur Pulau Pisanggadang, ditempat ini terdapat tiga buah dermaga dan lautnya cukup dalam untuk kapal berlabuh.

Untuk mengangkut penumpang dari pulau Pisang ke Muara Padang, awalnya digunakan perahu yang di dayung oleh orang sekitar 12 orang. Karena resiko mengangkut penumpang dengan perahu cukup besar, pada waktu kemudian digunakan kapal kecil yang digerakkan dengan tenaga uap. Kapal merapat di sebuah dermaga kecil di tepi Batang Arau. Biasanya setiap kapal yang datang penduduk dapat mengetahui dari isyarat yang terdapat pada sebuah tiang bendera di puncak bukit.⁷

Pada pergantian abad, Kota Padang merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi Belanda di Sumatera Barat. Salah satunya setelah Belanda membuka pelabuhan *Emmahaven* (Peluk Bayur) yang menjadi salah satu pelabuhan yang mengantarkan Padang kepada perubahan perekonomian karena pelabuhan tersebut salah satu pelabuhan yang banyak di kunjungi oleh orang asing. Selain mendirikan pelabuhan *Emmahaven* pada tahun 1892. Belanda juga mendirikan *Kamer Van De Koophandel* (kamar dagang).

⁷ *Ibid.*, h. 12

Selain menjadi pusat perekonomian Belanda Padang juga dijadikan pusat perdagangan, hal tersebut karena rencana pembangunan rel kereta api di Sumatera Barat digunakan untuk distribusi kopi dari daerah pedalaman (Bukittinggi, Payakumbuh, Tanah Datar dan Pasaman).⁸

Pembangunan Kota Padang meningkat setelah pemerintahan Belanda mempercepat melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas. Misalnya membangun pelabuhan Teluk Bayur di Padang pada tahun 1883 kemudian dirampungkan pada tahun 1892.⁹

Perubahan-perubahan berlangsung sekitar abad ke-19 yang sejalan dengan mengalirnya arus pendatang baru ke Padang, khususnya pendatang Eropa. Kedatangan Eropa ke Padang membuat komposisi penduduk Padang semakin beragam. Pada umumnya mereka adalah serdadu Kolonial dan sekaligus orang pemerintahan militer, para pegawai “*gubernemen*” yang masih amat terbatas jumlahnya. Sebagian diantaranya bekerja sebagai pegawai *Nederlandsche Handelsmaatschappij* (NIM-perusahaan dagang pengganti VOC) yang sudah di buka di Padang pada tahun 1826. Kantor tersebut merupakan kantor satu-satunya yang ada di luar Pulau Jawa.

Pada masa kolonial keadaan fisik Kota Padang semakin maju, karena Padang di jadikan sebagai pusat pelabuhan sehingga banyak Negara-negara luar yang sering singgah ke Padang. Pada awalnya

⁸ Aulia Rahman, “*Modernisasi Teknologi Kereta Api Di Sumatera Barat Masa Kolonial Belanda (1871-1933)*”, *Jurnal Arkeologi*, Vol.24, No. 1, Mei 2019, h. 22

⁹ Dedi Arsa, *The Fall Of Sawalunto (Studi Tentang Pengaruh Gejolak Ekonomi-Politik Global Terhadap Perkembangan Sebuah Kota Lokal, 1930-1940)*, *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 8, No. 15, Januari-Juni 2018, h. 52

Kolonial datang ke Padang hanya untuk sekedar berdagang. Tetapi setelah Kolonial melihat daerah Padang yang strategis dan kaya akan hasil bumi maka Kolonial datang ke Padang tidak hanya untuk berdagang namun juga untuk menguasai Kota Padang.

Pada masa Kolonial Kota Padang sebagai Kota pantai dan Kota pelabuhan berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang strategis oleh pemerintahan Kolonial Belanda untuk menguasai daerah pedalaman Minangkabau (*Hinterland*) yang kaya akan hasil bumi. Kehadiran VOC di Kota Padang tidak lepas dari perjanjian Painan (*Het Painansch Traktaat*) tahun 1663, dimana orang Minangkabau meminta bantuan Belanda untuk mengusir orang Aceh dari Padang. Sebagai hadiahnya Belanda boleh mendirikan loji di Pulau Cingkuk. Setahun kemudian loji tersebut dipindahkan ke Padang yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kantor atau sebagai gudang dan sebagai benteng tempat melakukan perdagangan dan administrasi pemerintahan dan pusat pemerintahan VOC, dengan begitu Belanda menjadikan Padang sebagai tempat pemukiman perdagangan dan juga tentara. Pemerintah Kolonial Belanda menjadikan Padang wilayah sepanjang aliran Sungai Batang Arau atau yang dikenal dengan daerah Muaro Padang sebagai wilayah pemukiman militer.¹⁰

Diluar jantung Kota Padang terdapat daerah pemukiman penduduk sejak abad ke-19 Padang dibagi ke dalam delapan *Wijk* (kampung), kepala kampung biasanya diangkat dari kaum bangsawan setempat. Salah satu

¹⁰ Refni, Meri, Gusti, Nopriyasman, BAKABA (*Jurnal Sejarah Kebudayaan dan Pendidikan*), *Laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang*, 2007, h. 19-20

keluarga bangsawan terkemuka di Padang pada masa itu adalah Tuanku Bandaro Tan Batuah, berasal dari *Wijk VII* (Kampung Tujuh) di Alang Laweh. Keturunan bangsawan pada umumnya tinggal di sekitar Alang Laweh, dimana mereka tinggal di rumah-rumah besar bertiang tinggi, yang dibangun di tengah taman atau kebun-kebun luas. Alang Laweh sejak awal abad ke-20 juga dikenal sebagai benteng gerakan Kaum Tua dengan basisnya di Mesjid Gantiang sekarang.¹¹

Setelah Kolonial berhasil menguasai Kota Padang, Kolonial mulai mengubah tatanan administrasi yang ada di Kota Padang. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kolonial mulai dari wajah Kota Padang dari coraknya yang lama sebagai Dusun Besar (*Big Village*) menjadi sebuah Kota administratif Belanda tampaknya baru mulai sejak awal abad ke-20.¹²

Perubahan terpenting dalam sejarah pertumbuhan Padang sebagai Kota administratif baru dimulai sejak awal abad ini ketika Padang resmi menjadi Kotapraja (*Gemeente*) sebagaimana tercatat dalam lembaran negara atau *staatblad*, No. 151, 1 Maret 1906. Dengan adanya status tersebut maka Padang berhak mengurus rumah tangga sendiri.

Dengan adanya status tersebut Padang di perkenalkan tentang pengaturan administratif yang lebih bersungguh-sungguh, dan juga di perhatikan pembangunan fasilitas Kota seperti pelistrikan, *Waterleiding*, prasarana dan sarana transportasi. Pada awal abad ke-20 perubahan

¹¹ Mestika Zed, *Kota Padang Tempo Doeloe, Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi*, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2009, h. 8

¹² *Ibid.*, h. 13

Padang sangat terlihat, mulai dari segi pemerintahan maupun dari segi pertumbuhan penduduk dan fasilitas Kotanya.

2. Kota Padang Pada Masa Jepang

Indonesia merupakan negara yang mengalami dua zaman penjajahan yaitu penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Hidup di zaman pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun jauh lebih berat dari penjajahan Belanda selama tiga setengah abad.¹³ Setelah kekuasaan Belanda runtuh, Jepang datang menggantikannya (1942-1945), Jepang mendarat di Sumatera Barat pada tanggal 13 Maret 1942.¹⁴

Jepang menjajah bangsa Indonesia selama tiga setengah tahun, namun penjajahan Jepang jauh lebih kejam dari pada penjajahan Belanda. Rezim Jepang lebih bersifat sewenang-wenang, tindakannya tidak dapat diduga, tindakannya lebih kejam dari rezim pendahulunya (Belanda). Namun bersamaan dengan itu rezim tersebut juga banyak bergantung pada kerja sama dengan unsur-unsur lokal.

Dalam masa pendudukan Jepang, Padang berada di bawah kepala pemerinthan Jepang dengan nama “*Sityo*” dalam bidang administrasi Jepang memperluas Padang dengan memasukkan daerah-daerah.

1. Ulak karang seluruhnya
2. Andalas Marapalam dan seluruhnya
3. Seberang Padang seluruhnya
4. Teluk Bayur

¹³Mestika Zed, Dkk, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Kota Padang dan Sekitarnya 1945-1949*, Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia, h. 9

¹⁴ Dedi Arsa, *Op.Cit.*, h. 54

5. Bukit Air Manis

6. Gunung Pangilun

Karena Padang berada dalam kondisi perang, maka kehidupan ekonomi Padang di atur sepenuhnya untuk kepentingan perang Jepang. Masyarakat berada di bawah tekanan kekerasan dan kekejaman Jepang.

Penjajahan Jepang yang hanya sekitar tiga setengah tahun membawa perubahan yang sangat besar bagi Kota-kota di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut salah satunya dalam bidang administrasi pemerintah. Pada awal kedatangan tentara Jepang dan dengan menyerahnya pemerintah Hindia-Belanda tanpa syarat pada awal Mei 1942, Jepang kemudian menyusun pemerintah sementara untuk Indonesia. Pemerintah sementara tersebut melibatkan banyak warga sipil Indonesia.

Pada abad ke 20 merupakan periode mulai intensifnya hubungan Minangkabau dengan Jepang. Pada masa itu beberapa orang Jepang sudah mulai tinggal dan berusaha di daerah itu. Salah satu pengusaha Jepang yang pertama kali membuka usaha secara besar-besaran di daerah ini yaitu Masagidi Toyo Izumi yaitu dengan membuka perkebunan di Bungo Kayu. Selain itu bangsa Jepang juga terlibat dalam kegiatan perdagangan dan perikanan. Dua persahaan perdagangan dan perikanan yang terkenal pada waktu itu yaitu *Hiramoto Co dan Tokhai Co*.

Pada abad ke 20an jumlah penduduk Jepang di Sumatera Barat meningkat dan usaha mereka juga semakin beragam seperti ada yang berprofesi sebagai tukang sepatu, tukang jam, tukang foto bahkan ada

yang menjadi pelacur. Pada masa itu beberapa perusahaan kapal Jepang seperti *Nippon Yusen* dan *Nanyo Yusen Kabushi-Khaisa* membuka rute langsung via Singapura ke kawasan ini. Pada akhir abad ke 20an barang-barang Jepang (terutama tekstil) membanjiri Sumatera Barat.

Disisi lain beberapa lembaga dan perorangan Jepang juga aktif melakukan pendekatan kepada orang Sumatera Barat. Contohnya pada tahun 1930 *Toyoma Sitsuru* memberi beasiswa kepada Majid Usman dan Rusli Saleh untuk melanjutkan pendidikan mereka ke Universitas Meiji di Tokyo, serta Mayor Fujiwana Iwaichi yang merekrut beberapa orang Sumatera Barat untuk dijadikan mata-mata.¹⁵

Pada awal kedatangannya Jepang berupaya datang menarik simpati rakyat Indonesia dengan harapan mendapat dukungan dan kerja sama dari para pemimpin rakyat setempat. Jepang sampai di Padang pada tanggal 17 Maret 1942. Menjelang kedatangan Jepang, Padang Ibukota keresidenan Belanda di Sumatera Barat (*Sunda's Westkust*), terus menerus terancam serangan-serangan mendadak dari pihak Jepang. Sepanjang bulan Desember 1941 sampai Februari 1942, Jepang melakukan serangan udara.¹⁶

Ketika Jepang sampai di Padang, mereka tidak mendapatkan perlawanan apa-apa dari pihak Belanda, karena tidak mungkin melakukan perlawanan kepada pihak Jepang, pasukan Belanda yang bertahan di garis pertahanan di luar Kota mundur masuk Kota untuk bersiap-siap kabur

¹⁵ Gusti Asnan, *Op.Cit.*, h. 116-117

¹⁶ Mestika Zed, Dkk, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan*, *Op.Cit.*, h. 20

lewat Teluk Bayur (*Emmahaven*), yang termasuk diantara rombongan adalah Sukarno, yang di ciduk dari tahannya di Bengkulu di bawa ke Padang untuk seterusnya mau dilarikan ke Australia. Karena Kota Padang sudah jatuh ke tangan Jepang, Sukarno dilepaskan di Padang.

Setelah Kota Padang jatuh ke tangan Jepang, sebagian pasukan Belanda sudah berhasil kabur ke Australia dan sebagiannya lagi karam di tengah laut karena dihantam meriam Jepang. Disamping itu banyak penduduk sipil Belanda yang di tawan Jepang. Pada tanggal 27 Februari 1942 kapal perang Belanda "*Poelau Tello*" di bom Jepang dan tenggelam di *Emmahaven*.¹⁷

Saat Jepang memasuki Kota masyarakat belum berani keluar rumah, dengan perasaan masih ragu dan curiga mereka menyambut kedatangan Jepang di pinggir jalan. Pada saat itu Jepang datang dengan kendaraan mobil militer, kompi dengan sepeda dan ada yang berjalan kaki dengan meneriakkan *yo yo yo Banzai, Banzai, Banzai Nipon, Banzai Indonesia*).

Karena meneriakkan slogan "Asia untuk Asia" dan ingin mengusir penjajahan Belanda maka sejak itu masyarakat menaruh harapan kepada Jepang, bahwa Indonesia akhirnya akan merdeka. Rakyatpun segera terbawa arus dengan propaganda Jepang yang menggugah.

Pada saat kedatangan Jepang di Padang, masyarakat diperbolehkan menaikkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia raya

¹⁷ *Ibid.*, h, 21

kapan saja masyarakat mau. Sementara pada masa penjajahan Belanda kedua simbol kebangsaan tersebut dilarang untuk mempertunjukan di tempat umum dan akan mendapatkan hukuman berat jika diketahui oleh PID (intelijen) Belanda.

Pada masa penjajahan Jepang, sejak awal berkuasa, Jepang berusaha menghapus segala hal yang berbau Barat. Bahasa Belanda di larang dan digantikan dengan bahasa Indonesia. Buku-buku pelajaran yang berbahasa Belanda di larang keras di gunakan di sekolah-sekolah. Selain mengguankan bahasa Belanda lembaga-lembaga pemerintahan juga di ganti seperti pada masa Kolonial Belanda bernama *Stadsgemeente* di ubah namanya dengan nama Jepang menjadi *Shi*.¹⁸

Kebijakan Jepang terhadap segala sesuatu yang berbau politik juga semakin ketat. Siapa saja yang ketahuan melanggar peraturan pemerintahan militer Jepang di tindak dengan keras. Jepang mulai menunjukkan sifat represinya, suatu sifat kediktatoran yang cenderung menyelesaikan urusan dengan kekerasan. Sehingga masyarakat mulai bergidik takut untuk berbeda pendapat. Apalagi menentang segala peraturan dan interuksi yang datang dari penguasa baru itu, jika menentang perlakuan mereka ujung-ujungnya hanya akan mendapatkan perlakuan kasar dan perlakuan yang semena-mena.¹⁹

Jepang merupakan penjajah yang paling angkuh menduduki Kota Padang. Karena Jepang berbuat semena-mena kepada masyarakat Kota

¹⁸ Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 112

¹⁹ Mestika Zed Dkk, *Op.Cit.*, h. 23-24

Padang mulai dari mengambil hasil panen sampai dengan mengambil paksa sepeda atau mobil yang sedang di kendarai pemiliknya di tengah jalan. Selain itu Jepang juga bisa mengambil seluruh gedung-gedung dan rumah warga untuk di gunakan sebagai kantor, bahkan lebih mengerikan lagi Jepang bisa meminta paksa anak gadis orang. Jepang memang di kenal dengan rezim yang keras dari pada rezim Belanda. Walau Jepang menjajah hanya tiga setengah tahun namun kebijakan yang dibuat Jepang sungguh lebih mengerikan dari pada rezim Belanda.

Padang merupakan salah satu Kota strategis yang memiliki banyak pegunungan dan kelautan. Sehingga Padang banyak menghasilkan perekonomian yang melimpah. Jauh sebelum Jepang datang ke Padang, ekonomi masyarakat Kota Padang sudah maju dengan penghasilan pertanian, bahkan sebagian besar mata pencaharian penduduknya di topang oleh hasil pertanian. Karena pada masa itu Padang di kuasai oleh Jepang maka hasil pertanian yang di terima masyarakat Kota Padang di ambil oleh Jepang, bahkan masyarakat Padang hanya menerima sedikit dari hasil tanamannya.

Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang hampir sama, hanya saja Jepang lebih keras dari pada Belanda. Pada masa kedua zaman tersebut luas kota Padang juga berbeda-beda. Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, yang sesuai dengan *staatsblad* No. 321 tahun 1913 Padang dan sekitarnya terdiri tujuh district yang di bedakan atas:

- a. Padang Kota, yang terdiri dari distrik Tanah Tinggi, Batang Arau dan Binuang.
- b. Padang luar Kota, terdiri dari distrik Koto Tengah, Pauh IX, Sungkai dan Pauh V.²⁰

Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan Jepang berusaha memperluas daerah Kota Padang dengan memasukkan kampung-kampung yang selama ini terletak di luar Kota, kampung atau daerah tersebut adalah Ulak Karang, Andalas Marapalam, Seberang Padang, Teluk Bayur, Bukit Air Manis dan Gunung Pangilun.²¹

B. Proses Penetapan Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi

Setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Kota Padang berada dibawah pemerintahan RI melalui ketetapan Gubernur Sumatera Barat tanggal 17 Mei 1946 No. 103. Aturan ini juga menetapkan Kota Padang sebagai Kota Besar. Walikota Padang yang pertama yang di angkat yaitu Abubakar Jaar yang hanya menjabat beberapa bulan saja. Mr. Abubakar dipindahkan menjadi residen di Sumatera Timur. Padang dipimpin oleh Bagindo Aziz Chan. Walikota yang dikenal sebagai walikota pejuang ini, tanggal 19 Juli 1947 gugur akibat penghianatan dari tentara Belanda.

Pada saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, karena Padang memiliki alat kelengkapan alat telekomunikasi yang lebih baik, maka berita proklamasi tersebut lebih dahulu

²⁰ Maryetti Dkk, *Peranan Kaum Wanita Dalam Perjuangan Kemerdekaan di Front Timur Kota Padang*, Padang: Intisar, 2002, h. 7

²¹ *Ibid.*, h. 9

didengar oleh kalangan pemuda yang mempunyai kontak dengan mereka yang bekerja di kantor telkom.

Padang memiliki sarana komunikasi yang lebih baik, seperti “Domei” dan koran “Padang Nippo” di samping memiliki telekom milik pemerintah. Karena sarana telekomunikasi yang baik maka proklamasi kemerdekaan lebih cepat sampai kepada kalangan pemuka dan pemuda seperti Chatib Sulaiman dan Ismael Lengah. Setelah tiga hari mereka mengadakan pertemuan untuk membicarakan gerakan selanjutnya dari berita proklamasi itu. Kemudian rapat tersebut berlanjut sampai esoknya tanggal 21 agustus 1945 dengan jumlah peserta yang lebih luas dan lebih banyak.

Hasil rapat tersebut yaitu membentuk organisasi yang menjadi wadah gerakan mereka dengan nama B.P.P.I (Badan Penerangan Pemuda Indonesia) dan mengibarkan bendera merah putih di markas B.P.P.I yang terletak di Pasa Gadang. Sedangkan pada hari yang sama pemuda Bukittinggi mengadakan rapat pembentukan organisasi pemuda bertempat di “Guru Mhyik Jambek” yang disponsori oleh urusan pemuda dari Jawa.

Pada tanggal 29 Agustus 1945 Muhammad Syafei di Bukittinggai membuat pernyataan atas nama bangsa Indonesia di Sumatera mendukung proklamasi yang disampaikan Sukarno-Hatta. Di padang, pada waktu yang bersamaan bendera merah putih pertama kali dikibarkan di kantor pemerintahan ialah kantor polisi Kota. Setelah lima hari kemudian merah putihpun dikibarkan di kantor residen yang telah diambil oleh Muhammad

Syafei yang terpilih menjadi residen R.I pertama oleh K.N.I Sumatera Barat pada rapatnya tanggal 31 Agustus 1945 di Padang.²²

Setelah ditandatangani perjanjian KMB (Konperensi Meja Bundar) maka Belanda mengembalikan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Demikian juga halnya Padang yang menjadi Kota otonom di bawah pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah yaitu dengan ketetapan gubernur Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 nomor 65/gp 50.²³

Dengan ketetapan gubernur Sumatera Tengah tersebut maka daerah Padang di perluas dengan daerah-daerah seperti yang di tetapkan sewaktu zaman pendudukan Jepang. Sedangkan kewedanaan Padang dihapuskan dan urusannya di serahkan kepada walikota. Untuk manampung urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh wedana, dibentuklah bagian pemerintahan umum dan seksi politik pada kantor walikota Padang yang diselenggarakan oleh petugas-petugas pamongpraja yang di pebantukan.

Kota Padang dikembalikan ke tangan R.I yang merupakan negara bagian melalui SK. Preside RI Serikat (RIS), 9 Maret 1950 No. 111. Kemudian dengan SK Gubernur Sumatera Tengah, tanggal 15-8-1950 No. 65/GP-50, ditetapkan pemerintah Kota Padang sebagai suatu daerah otonom sementara menunggu penetapannya sesuai Undang-undang No. 225 tahun 1948. Sesuai dengan ketetapan Gubernur Sumatera Tengah, Kota Padang di

²² Hasan Basri Durin, *Op.Cit.*, h. 57-59

²³ Mardanas Sofwan, *Sejarah Kota Padang*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987, h. 3

perluas, kewedenan Padang dihapus dan urusannya dipindahkan ke Walikota Padang, lalu di bentuk Resort Administratif.²⁴

Setelah Padang di perluas pengelolaannya dibagi menjadi tiga daerah resort kecamatan yang dikepalai Aisisten Wedana yaitu kecamatan Padang Barat, Padang Timur, dan Padang Selatan. Dengan keluarnya UU No.5 tahun 1974, tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, Kota Padang selain sebagai Kota otonom Padang juga sebagai daerah administratif yang di kepalai seorang walikota Madya, sedangkan batas wilayahnya belum mengalami perubahan.²⁵

Sebagai Ibukota provinsi Sumatera Barat maka Kota Madya Padang telah menjalankan fungsinya sebagai Kota pusat pemerintahan. Dengan demikian setelah menjadi pusat pemerintahan maka pembangunan sarana perkantoran bagi pemerintah tingkat I Provinsi Sumatera Barat, baik kantor-kantor departemen maupun dinas-dinas tingkat I serta lembaga-lembaga non departemen berkembang dengan pesat.

Selain itu sarana perkantoran ini juga berkembang untuk sektor jasa seperti perbankan, asuransi dan perusahaan-perusahaan swasta. Fungsi Kota Padang sebagai pusat pemerintahan ini telah ditetapkan didalam pola dasar pembangunan daerah dan *master plan* tahun 1983-2003. Berdasarkan *master plan* ini zona pengembangan Kota Padang sebagai pusat pemerintahan di

²⁴ Bappeda Tk II Kotamadya Padang, *Padang Kota Industri, Perdagangan dan Pariwisata*, 1997

²⁵ Bappeda Tk II Kotamadya Padang, *Padang Kota Industri, Perdagangan dan Pariwisata*, 1997

tetapkan di daerah pusat Kota, yaitu mencakup daerah kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Padang Selatan serta Nanggalo.

Pengembangan Padang sebagai pusat pemerintahan turut mempengaruhi pengembangan Kota di sekitar lain seperti pemukiman, transportasi, fasilitas sosial dan sebagainya. Selain itu perkembangan pembangunan sarana perkantoran juga terdapat pembangunan perumahan seperti rumah dinas, asrama, real estate, perumnas dan lain-lain.²⁶

Kota Madya Padang mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengembangan sektor perdagangan di Sumatera Barat, bahkan peranannya menjangkau sebagian wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau dan Jambi. Sebagai Ibukota provinsi Sumatera Barat Padang memiliki pelabuhan laut Teluk Bayur dan pelabuhan Muara yang melayani pelayaran samudera dan antar pulau. Selain pelabuhan Teluk Bayur dan pelabuhan Muara Padang juga memiliki pelabuhan Udara Tabing antar pulau yang telah dapat didarati oleh pesawat DC-19, Kebunau Padang juga merupakan pusat transportasi darat yang memiliki terminal regional lintas Andalas sehingga merupakan simpul lalu lintas kendaraan bermotor antar daerah untuk jurusan Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang dan Jakarta.

Karena adanya transportasi tersebut maka Padang dijadikan pelabuhan ekspor dan perdagangan antar pulau bagi daerah Sumatera Barat dan sekitarnya. Dengan demikian seluruh arus barang untuk ekspor maupun untuk

²⁶ R. Batuah, *Padang Pintu Gerbang Pantai Barat Indonesia*, Padang: Mandala Buana Bhakti, 1991, h. 49-50

perdagangan regional bagi daerah Provinsi lain melalui Kota Padang, dengan begitu maka Padang menjadi pusat perdagangan besar di Sumatera Barat.²⁷

Selain sebagai pusat perdagangan Padang juga dijadikan sebagai pusat perindustrian di Sumatera Barat. Fungsi ini di tunjang dengan adanya prasarana dan tenaga listrik, air minum, transportasi, pelabuhan ekspor serta terdapatnya jumlah tenaga kerja yang cukup besar dalam berbagai keahlian.

Potensi industri yang paling besar di Sumatera Barat yaitu pabrik semen Padang yang didirikan pada tahun 1987. Selain industri semen Padang, Kota Padang juga memiliki sektor pertanian, diantara jenis-jenis industri yang ada di Kota Padang yaitu;

1. Industri *Crumb Rubber*
2. Industri minyak goreng
3. Industri sabun
4. Industri rotan
5. Industri *soybean pasta*
6. Industri seng
7. Industri roti/kue
8. Industri kulit dan barang dari kulit
9. Industri perbengkelan dan koperasi
10. Industri tekstil
11. Industri rokok
12. Industri minuman, dan sebagainya.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG**

²⁷ *Ibid.*, h. 50

Sebelum perang dunia II Sumatera merupakan suatu wilayah pemerintahan atau *Gouvernement*, yang terdiri dari 10 keresidenan, yaitu keresidenan Aceh, dan daerah taklukannya, Sumatera Timur (Medan), Tapanuli (Sibolga), Sumatera Barat (Padang), Riau (dan daerah taklukannya, Tanjung Pinang), Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka Biliton (Pangkal Pinang).

Pimpinan tertinggi pemerintahan di Sumatera dipegang oleh seorang *Gouverneur* (Gubernur) berkedudukan di Medan yang merupakan koordinator dari residen. Residen merupakan penguasa pemerintah setempat (*Hoofd Van Plaatselijk Bestuur*) di daerahnya. Kota Medan, Padang dan Palembang, masing-masing di kepalai oleh seorang walikota yang di dampingi oleh suatu Dewan-Kota (*Gmeente-Raad*) dan juga mempunyai *Wethouder* semacam pemerintah harian).²⁸

Sedangkan pada pemerintahan sesudah proklamasi pemerintahan negara republik Indonesia mulai dengan resmi di jalankan di Sumatera pada tanggal 3 Oktober 1945. Pada tanggal 19 Januari 1946 di Bukittinggi dibuka perwakilan pemerintahan Agung di Sumatera, di pegang oleh Adinegoro.

Pada tanggal 17 April 1946 di Bukittinggi dilantiklah Dewan Perwakilan Sumatera yang beranggotakan 100 orang. Dalam sidang yang pertama dewan ini telah mengambil keputusan bahwa Sumatera di bagi atas 3 sub-Provinsi

²⁸Panitia Almanak Nasional Sumatera 1969 (Pantra 69), *Almanak Sumatera*, Komando Antar Daerah Sumatera:Medan, 1969, h. 195

- a. Sub-Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli
- b. Sub-Provinsi Sumatera Tengah yang terdiri dari Sumatera Barat, Riau dan Jambi
- c. Sub-Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.²⁹

Diawal tahun 1950 an Kota Padang merupakan salah satu dari 16 Daerah tingkat yang ada dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Waktu itu Kota Padang mempunyai status Kota Praja di bawah seorang walikota. Kemudian Sumatera Tengah di pecah tahun 1958, karena itu Kota Padang menjadi salah satu dari 14 Daerah Tingkat II yang ada dalam lingkungan Provinsi Sumatera Barat dengan status Kota Madya.³⁰

Dalam pembentukan Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat, Padang mengalami masa sejarah yang cukup panjang, menjadi salah satu tempat penjajahan bagi bangsa lain. Namun dengan semangat yang tidak pudar dan semangat dari masyarakat untuk selalu melawan penjajah Belanda akhirnya Padang bisa mengusir Kolonial Belanda.

Pada masa pemerintahan Belanda di ambil alih oleh Jepang semua nama-nama yang bersangkutan dengan Belanda diubah dengan nama (*Stadsgemeente Menjadi Shi*). Pada pemerintahan Jepang *Shi* di ubah menjadi Kota Besar (1946), Kota Praja (1957), dan akhirnya Kota Madya (1965). Pada waktu itu Jepang menjadikan Bukittinggi sebagai Ibukota Sumatera Barat dan

²⁹ *Almanak Sumatera, Op.Cit.*, 1969, h. 200-203

³⁰ Mardanas, *Sejarah Kota Padang*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987, h. 41

pada awalnya kemerdekaan Bukittinggi tetap menjadi Ibukota Sumatera Tengah atau Sumatra Barat.

Pada tahun 1958 Padang menjadi Ibukota Sumatera Barat secara *De Facto*, dan pada tahun 1979 resmi menjadi Ibukota Sumatera Barat. Kemudian pada masa pemerintahan Jepang memperluas Kota Madya ke arah selatan dengan memasukan Teluk Bayur dan ke arah utara untuk memasukan bantaran Selatan Sungai Kuranji. Setelah Belanda mengambil alih kembali ukuran Padang diperkecil dengan batas-batas masa sebelum perang, namun gubernur kembali mengembalikan ukuran ini menurut batas-batas yang di Jepang tetapkan.

Kemudian setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 18 tahun 1965, maka Kota Praja Padang di rubah menjadi Daerah Tingkat II Kota Madya Padang, dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1979 yaitu sejak di tetapkannya Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat terlihat perkembangan yang sangat pesat sehingga menimbulkan suatu sejarah baru bag Kota Padang yaitu timbulnya suatu gagasan untuk mengadakan perluasan wilayah administratifnya.

Dengan adanya suatu peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1979 maka secara yuridis Kota Padang menjadi Ibukota Provinsi Sumatera Barat. Dalam perannya sebagai Ibukota Provinsi maka fungsi lain yang melekat pada Kota Padang adalah seperti;

1. Kota pelabuhan
2. Kota perdagangan

3. Kota pendidikan dan lain sebagainya

Setelah melalui pembicaraan dengan gubernur KDH TK I Sumatera Barat dan dengan persetujuan DPRD Padang Pariaman, maka gagasan perluasan wilayah Kota Padang yang di ajukan oleh walikota Padang dapat diterima oleh pemerintah kabupaten Padang Pariaman dan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1980, maka perluasan daerah Kota Padang dengan tiga Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.³¹

Bedasarkan keputusan pembicaraan dengan sekretaris jendral kementerian dalam negeri dan kepala bagian desentralisasi dan otonom adalah sebagaimana berikut;

1. Diakui secara *De Facto* Kota Padang sebagai Kota Besar termasuk daerah-daerah baru
2. Selanjutnya diberikan penerangan, Kota Padang dapat dibentuk sebagai daerah otonom Kota Besar berdasarkan:
 - a. Kota Padang dan sekitarnya sudah mempunyai status *Stadtgemeinde*
 - b. Pembentukan Kota Besar tidak lah semata-mata di gantungkan kepada jumlah penduduk saja, tapi juga harus berpedoman kepada keadaan yang nyata sekarang, seperti keadaan ekonomi, perdagangan, letaknya dan lain-lain untuk menjadikan Kota Besar

³¹ Monografi Kota Madya TK II Padang, h. 15-16

- c. Pembentukan Kota Padang sebagai Kota Besar maka soal yang sekarang menjadi ruwet, dengan sendirian akan selesai, misalnya soal daerah baru, soal walikota, soal keuangan dan lain-lain.³²

Setelah Jepang mengambil alih pemerintahan dari tangan Belanda dan Jepang mengubah nama-nama yang berkaitan dengan nama Belanda. Dalam periode kemerdekaan Jepang di rubah menjadi Kota Besar (1946), Kota Praja (1957) dan akhirnya Kota Madya (1965). Jepang menjadikan Bukittinggi sebagai Ibukota Sumatera Barat dan pada awal kemerdekaan Bukittinggi tetap menjadi Ibukota Sumatera Tengah atau Sumatera Barat.

Pada tahun 1958, Padang menjadi Ibukota secara *De Facto*, dan di tahun 1979 resmi menjadi Ibukota Sumatera Barat. Kemudian Padang mulai memperluas Kota ke arah selatan dengan memasukkan Teluk Bayur dan ke arah utara untuk memasukkan bantaran Selatan Sungai Kuranji.³³

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1979 tanggal 28 september 1979 tentang pemindahan Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang dalam keputusan tersebut Ibukota Provinsi Sumatera Barat di pindahkan dari Bukittinggi ke Padang. Pemindahan Ibukota dari Bukittinggi ke Padang karena Padang dianggap memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

³² Arsip Kota Padang, Dari *Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Padang yang di Utus ke Kementerian Dalam Negeri Jakarta Untuk Membicarakan Soal-Soal dan Kesulitan yang Dihadapi Oleh DPRD Dan DPDS Kota Padang Dalam Melanjutkan Tugas-Tugasnya Sekarang (Ketetapan DPRDS Kota Padang), Tanggal 19 Desember 1951 No.07*

³³ Freek Columbijn, *Op.Cit.*, h. 172

Selain memenuhi syarat untuk di jadikan sebagai sebuah Ibukota Sumatera Barat Padang juga di jadikan sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat di laksanakan di Padang sehingga dengan demikian maka baik fasilitas perkantoran, perumahan maupun fasilitas-fasilitas lainnya tidak menjadi persoalan lagi bagi pemindahan Ibukota Provinsi Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang.³⁴

C. Walikota Padang Pada Awal Kemerdekaan Sampai Tahun 2018

1. Mr. Abu Bakar Jaar

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 agustus 1945, Padang menjadi sebuah Kota Praja. Walikota pertama adalah Abubakar Jaar, SH dan di dampingi oleh komite nasional yang bertindak sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1945.

Setelah kemerdekaan di Kumandangkar dengan sarana telekomunikasi milik pemerintah dan dengan komunikasi yang baik seperti “Domei” dan koran “Padang Nippo” dan telah mengadakan berbagai rapat berkibarlah bendera putih pertama di kantor polisi Kota, sebagai walikota Padang pertama yang terpilih yaitu Abubakar Jaar, yang mana Abubakar Jaaar adalah seorang pengacara dan pernah mengajar di *Islamitiesche Hooge School di Padang*.

³⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1979, *Pemindahan Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Dari Bukittinggi Ke Padang*.

Pada tahun 1946 pemerintah RI di Sumatera Barat atau keresidenan Sumatera Barat berhasil mengangkat Mr. Abu Bakar Jaar sebagai wali Kota Padang yang pertama dalam menjalankan pemerintahan walikota Padang yang di bentuk pada tahun itu juga.³⁵

Mr. Abu Bakar Jaar adalah walikota pertama Kota Padang setelah kemerdekaan. Mr. Abu Bakar Jaar adalah seorang pamong dan setelah kemerdekaan Indonesia diangkat menjadi walikota Padang di Sumatera Barat hanya menjabat beberapa bulan saja. Setelah menjadi walikota Padang Mr. Abu Bakar Jaar di pindahkan dan diangkat menjadi residen di Sumatera Timur pada tanggal 03 Oktober 1945 maka jabatannya sebagai walikota Padang di isi oleh Aziz Chan.³⁶

Walikota Abu Bakar Jaar menghadapi tugas yang berat dan berbahaya, terutama karena meningkatnya ketegangan-ketegangan antara unsur-unsur republik versus sekutu/ NICA. Dari waktu ke waktu Padang telah menjadi pusat perebutan pengaruh antara dua otoritas (kekuasaan) sekutu/ NICA di satu pihak, dan Republik (RI) di pihak lain. Dengan demikian Kota Padang pada masa ini, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, berada di bawah otoritas berbeda dengan daerah kontrol sekutu, dan ada pula yang di bawah otoritas republik.

Kecurigaan dan bentrok bersenjata antara kedua belah pihak sering terjadi pada saat sekutu/ NICA melakukan patroli dan pengawasan atas wilayah mereka. Dalam keadaan yang seperti itu, Belanda diam-diam

³⁵Mardanas Sofwan Dkk, (*Sejarah Kota Padang, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta*), 1987, h. 17

³⁶https://id.m.wikipedia.org/wiki/abubakar_jaar, diakses Selasa 23 April 2019, 11:30

sangat bernafsu untuk memanfaatkan setiap kesempatan, tanpa peduli dengan situasi yang berubah. Konflik kedua belah pihak sering terjadi terutama dalam hal-hal yang dianggap merugikan Belanda, sebaliknya kaum Republik di Kota Padang juga mencurigai peran yang dimainkan pasukan Inggris, karena sering terkesan memberi peluang kepada Belanda untuk menguasai kembali negeri ini.

Di tengah-tengah kegalauan mengkonsolidasikan kekuatan republik dalam Kota. Tiba-tiba walikota Abubakar Jaar dipindahkan ke Sumatera Timur, dimana ia di angkat sebagai residen yang berkedudukan di Tebing Tinggi. Mestinya kantor residen berada di Kota Medan, tetapi sejak kedatangan sekutu Kota itu praktis berada di bawah kekuasaan Belanda, maka pusat keresidenan terpaksa dipindahkan ke Tebing Tinggi, di kota inilah Abubakar Jaar menjalankan tugasnya sebagai residen, dengan begitu, untuk sementara pemerintahan Kota Padang terpaksa di jalankan oleh wakil walikota, yaitu Aziz Chan.³⁷

2. Bagindo Aziz Chan

Bagindo Aziz Chan merupakan putra minang asli, lahir di Padang pada tanggal 30 September 1910 selepas menyelesaikan pendidikan dasarnya di HIS (*Hollandsch-inlandsche school*) Padang, ia langsung merantau ke Jawa untuk menempuh pendidikan Sekolah Menengah di MULO (*Meer Uitgebraaid lager onderwijs*).

³⁷ Siti Fatimah Dkk, *Bgd Azizchan (1910-1947) Pahlawan Nasional Dari Kota Padang*, (Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia Bekerja Sama Dengan PKSBE FIS, UNP, 2007), h. 87-89

Tempat lahirnya Bagindo Aziz Chan yaitu terletak di Alang Lawas, sebuah rumah lama yang bakal dipugar, di rumah itu lahir seorang pemuda yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu Bagindo Aziz Chan yang menjabat sebagai walikota Padang kedua setelah Abubakar Jaar. Bagindo Aziz Chan di tembak Belanda, 19 Juli 1947, di lapai. Tempat terbunuhnya Aziz Chan ini di buat sebuah tugu berlambang tinju sebagai lambang dari tekad Bagindo Aziz Chan dalam mempertahankan kemerdekaan. Rumah Aziz Chan dijadikan museum yang didalamnya dapat dilihat dokumentasi perjuangan berupa gambar-gambar para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan.³⁸

Bagindo Aziz Chan adalah walikota Padang ke dua setelah Abu Bakar Jaar. Bagindo Aziz Chan lahir di Padang tanggal 30 september 1910 dan meninggal di Padang pada tanggal 19 juli 1947 pada umur 36 tahun. Bagindo Aziz Chan di lantik tanggal 15 agustus 1946.

Sebelum Aziz Chan menjadi walikota Padang, jabatan walikota sempat kosong. Belanda menduduki sebagian Kota tersebut, sedangkan pemerintah Republik Indonesia masih berjalan pada bagian Kota Padang lainnya. Pemerintah pusat menginstruksikan agar Kota Padang harus tetap berada di tangan kita *De Facto dan De Jure*.³⁹

Jenjang pendidikan yang di lalui oleh Bagindo Aziz Chan yaitu mengenyam pendidikan di HIS di Padang MULO di Surabaya, dan AMS

³⁸ Bappeda Tk II Kota Madya Padang, *Padang Kota Industri, Perdagangan dan Pariwisata*, Padang 1997

³⁹ Marah Joenoes, *MR.H.ST.MOH.RASJID Perintis Kemerdekaan, Pejuang Tangguh, Berani dan Jujur*, (Jakarta Pusat: PT Mutiara Sumber Widya), h. 63-64

di Batavia. Setelah tamat di AMS dan sempat dua tahun duduk di *rechtshoogeschool te batavia* (RHS), ia sempat membuka praktik pengacara dan aktif di beberapa organisasi, diantaranya sebagai anggota pengurus *Jong Islamieten Bond* di bawah pimpinan Agus Salim. Kembali ke kampung halamannya pada tahun 1935, ia mengabdikan sebagai guru di beberapa sekolah di Padang dan berkali-kali pindah mengajar ke luar Kota.

Selain itu Bagindo Aziz Chan juga sempat aktif di Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) sampai organisasi itu di bubarkan pada tahun 1937. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia di tunjuk sebagai wakil walikota Padang pada 15 agustus 1946 dilantik sebagai walikota menggantikan Mr. Abubakar Jaar yang pindah tugas menjadi residen di Sumatera Timur.

Sehari setelah pelantikan, Aziz Chan segera melakukan kunjungan resminya pertama sebagai walikota Padang ke markas besar sekutu. Kunjungan itu bermanfaat sebab kunjungan tersebut melakukan perundingan dengan sekutu. Ia sengaja di bawa oleh gubernur muda Sumatera Tengah Dr. M. Djamil, termasuk Azhari dari kepolisian RI Sumatera Barat. Pembicaraan dilakukan dengan Brigadir Thomson Mayor Fisches dan kapten Gilman. Manfaat yang jelas di terima Aziz Chan tentu saja ia dapat mengenal orang-orang sekutu dengan siapa ia kelak akan berhubungan.

Ketika baru menjadi walikota Aziz Chan melakukan upacara peringatan satu tahun kemerdekaan secara “*in door*” (tertutup). Ia mengumpulkan pegawai-pegawai yang kelak akan terus dipimpinya dan benar-benar memperingati hari bersejarah itu sekaligus.⁴⁰

Pada saat pemerintahan Abdul Aziz Chan belum genap setahun menjabat ia sudah harus menghadapi serbuan Belanda, berdaya upaya sekuat tenaga mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Perjuangan Bagindo Aziz Chan di tengah situasi pasca-kedatangan sekutu di Padang pada 10 oktober 1945, ia menolak tunduk terhadap kekuatan militer Belanda yang berada di belakang tentara sekutu. Ia terus melakukan perlawanan dengan menerbitkan surat kabar perjuangan yang bernama Republika Indonesia Jaya, bahkan turun langsung memimpin perlawanan terhadap Belanda sampai akhirnya meninggal pada tanggal 19 juli 1947.⁴¹

Dalam masa pemerintahannya, dalam keadaan gawat pada tanggal 30-31 Desember 1946 Abdul Aziz mengadakan beberapa perundingan di Padang yaitu mengenai panitia bersama gencatan senjata antara Indonesia-Belanda. Dalam perundingan itu, Belanda tidak dapat menerima usul-usul Indonesia, sehingga perundingan menemui jalan buntu. Jalan buntu itu timbul karena beberapa persoalan yang tidak dapat dipecahkan seperti jumlah polisi Indonesia. Republik Indonesia bersedia mengurangi dari

⁴⁰ Muslim Ilyas, *Riwayat Perjuangan Bagindo Aziz Chan Di Kota Padang*, Padang, 1984, h. 55-67

⁴¹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/bagindo_aziz_chan, diakses Sabtu, 13 April 2019, Pukul 2:10

1000 menjadi 500 orang, tetapi sebaliknya Belanda meminta polisi Indonesia hanya 360 orang.

Karena perundingan yang dilakukan oleh pihak Belanda dan Indonesia tidak terselesaikan dan hanya menemukan jalan buntu, maka Belanda mulai membuat kekacauan agar barisan-barisan perjuangan dan tentara Republik Indonesia keluar dari garis demarkasi sebelum jam 24.00 malam pada tanggal 31 Desember 1946. Malahan sebaliknya delegasi Republik Indonesia menegaskan pendiriannya “jika dijual tetap akan di beli”.

Karena kekacauan yang dilakukan oleh pihak Belanda terhadap Kota Padang tidak membuat masyarakat bertekuk lutut. Bahkan usaha Belanda untuk menguasai Kota Padang berhasil, karena biarpun keadaan di dalam dan di sekitar Kota Padang menyeramkan sekali namun pemerintah sipil Republik Indonesia dalam Kota Padang berjalan dengan lancar di bawah pimpinan walikota Bagindo Aziz Khan.

Usaha yang dilakukan oleh Abdul Aziz Chan dalam keadaan darurat dan karena pertempuran yang menjadi-jadi di sekitar Padang, maka bahan makananpun sulit di dapat, sehingga Abdul Aziz Chan memutuskan untuk membuat dapur umum. Dapur umum tersebut dikepalai oleh A. Latif dan yang bertindak mencari perbekalan adalah Said Rasad. Di samping itu harian Belanda memainkan perannya untuk mempengaruhi rakyat. Sebagai kontra aksi terhadap sikap Belanda tersebut maka walikota

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG**

Padang Abdul Aziz Chan menghidupkan kembali “Cahaya Padang” agar rakyat jangan menjadi bimbang terhadap situasi.⁴²

Pada masa pemerintahan Bagindo Aziz Chan Padang berada di bawah tekanan-tekanan tentara Inggris dan Belanda (NICA) dengan maksud mengembalikan kembali penjajahan di Padang. Setelah Bagindo Aziz Chan terbunuh dan beberapa hari kemudian Belanda melancarkan serangan keseluruhan daerah Sumatera Barat dan dengan sendirinya Padang menjadi daerah pendudukan Belanda.

3. Dr. A. Hakim

Dr. A. Hakim atau yang biasa di sebut Abdoel Hakim dengan gelar Soetan Isrinsah atau di singkat dengan A. Hakim adalah seorang dokter. Abdoel Hakim di angkat menjadi walikota Padang pada tahaun 1947-1949 pada masa pemerintahan Belanda periode 1931-1942.

Mendengar dari gubernur, kepala daerah, provinsi Sumatera Tengah membaca surat putusan sekretaris van Staat, hoofd van het departement van binnenlandsche zaken, dattula tanggal 22 november 1949 no. 1557, dimana dinyatakan bahwa A. Hakim walikota Padang diberikan korlap diluar tanggungan negara, untuk lamanya 6 bulan, terhitung dari tanggal 18 desember 1949.

Sebagai walikota, penjajah Belanda melantik seorang dokter, A. Hakim yang menginginkan sebuah negara Indonesia Federal. Pada watu pemerintahan A. Hakim penjajah Belanda membentuk dewan baru, dengan

⁴² Rusli Amran, *Padang Riwiyat Dulu*, (Jakarta:PTmutiara Sumber Widya, 1986), h. 112-

menjatahkan sebagian kursi kepada penduduk asli dan mengembalikan penghulu ke posisi pemimpin, dengan keyakinan yang keliru di pihak Belanda bahwa itulah yang di inginkan oleh penduduk.

Setelah penangkapan para pemimpin republik Indonesia dalam agresi Belanda kedua (desember 1948-januari 1949) Sumatera Barat membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang bergerak. Dan pada tanggal 27 desember 1949, Belanda memindahkan kedaulatan kepada negara federasi Indonesia, walaupun Padang tidak termasuk kedalam wilayah federasi, karena wilayah federasi hanya pada wilayah yang sebelum agresi Belanda kedua. Namun Padang kembali bergabung kedalam Republik pada tanggal 9 maret 1950, beberapa bulan sebelum seluruh wilayah bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan surat-surat putusan dari menteri dalam negeri yang di temukan dalam sebuah arsip kota Padang bahwa hasil putusan tersebut mengabarkan bahwa A. Halim di berhentikan dari masa jabatannya secara terhormat yang berhitung dari tanggal 18 Juni 1950.⁴³

4. Rasidin

Rasidin atau Dr. Rasidin adalah seorang dokter yang menjadi walikota Padang setelah Abdoel Hakim. Kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh Rasidin yaitu kebijakan pelarangan becak sebagai sarana transportasi di kota Padang. Karena menurut Rasidin becak sebagai sarana transportasi kurang manusiawi. Oleh karena itu Rasidin mengeluarkan

⁴³ Arsip Dari Buku Daftar Surat-Surat Putusan Menteri Dalam Negeri, 16 Juni 1951

kebijan tentang larangan penggunaan becak sebagai alat transportasi. Masa pemerintahan Dr. Rasidin yaitu pada tahun 1949 sampai dengan 1956.

Setelah kedaulatan walikota A. Hakim menyerahkan kedaulatannya, A. Hakim di gantikan oleh dokter Rasidin. Orang Minangkabau sangat sadar akan andilnya dalam memperjuangkan kemerdekaan, yang mereka pandang sebagai urusan Jawa-Minangkabau. Tindak lanjutnya mengecewakan, sebab pemerintah Nasional lebih cenderung pada sentralisasi daripada otonomi daerah, karena Sumatera Barat telah setia kepada pemerintah pusat, daerah ini cenderung terabaikan dalam hal pembangunan suatu negara baru. Pada tahun 1950, wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Jambi di gabung menjadi sebuah Provinsi besar.

Proses pelantikan Rasidin sebagai walikota terjadi sedikit kekelirian, yang mana dalam sebuah arsip mengatakan bahwa pelantikan Rasidin akan dilakukan pada tanggal 4 April 1952, namun Rasidin meminta penundaan pelantikan karena benjang belum selesainya perkara yang berupa tuduhan dari kejaksaan, peresmian itu belum dapat dilakukan demi menjaga nama baik pemerintah umum.⁴⁴

Namun setelah Rasidin di angkat menjadi walikota Padang, Penghargaan yang diberikan atas jasa-jasanya pemerintah Kota Padang mengabadikan namanya pada sebuah rumah sakit milik pemerintahan

⁴⁴ Arsip Kota Padang, *Penundaan Peresmian Keangkatan Walikota*, 1 April 1952, h. 2

daerah Kota Padang yaitu yaitu di beri nama rumah sakit umum daerah Dr. Rasidin.⁴⁵

Selama masa pemerintahan Rasidin pada umumnya keadaan daerah semenjak dipertanggungjawabkan kepadanya mendapatkan kemajuan dalam berbagai segi ketentraman kemasyarakatan dan perkembangan dalam waktu yang singkat. Dalam bidang politik, keadaan politik Kota Padang memperoleh perkembangan yang pesat.

Pada bidang ekonomi pada masa pemerintahan Rasidin, penduduk dari Kota Praja Padang ini masih di bilang terlampau lemah karena mereka baru mulai kembali didalam soal ini. Perjuangan ekonomi dari bangsa Indonesia hanya terbatas sehingga perekonomian masih rendah. Sedangkan dalam bidang sosial, dalam kesosialan para masa pemerintahan Rasidin mulai pesat seperti pada masa pemerintahan ini jumlah pelacur-pelacur yang bergelandangan sudah mulai tidak terlihat, anak-anak yang bergelandangan di jalan, tukang minta-minta, dan anak-anak yatim piatu sudah mulai berkurang dan dibeberangkan di tempat-tempat yang menyediakan itu.⁴⁶

Pembangunan yang dilakukan oleh Rasidin selama masa jabatannya yaitu banyak melakukan perbaikan sekolah- sekolah yang ditinggalkan, pembuatan sekolah-sekolah baru, memperbaiki 6 sekolah, 48 ruang toko yang baru, satu los pedagang terbuka cukup untuk kurang lebih

⁴⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/rasidinL>, diakses 1 Mei 2019, Pukul 21:15

⁴⁶ Arsip Kota Padang, Jawaban Surat Tt 7 September 1950 No. 2052/DN/ A Mengenai Laporan Berbagai Soal, h. 1-3

40 pedagang kecil, 33 toko yang diperjuangkan dari yang taklayaknya menduduki, 3 ruang untuk ruang keluarga rumah pegawai.⁴⁷

Pada tahun 1956, walikota Padang Rasidin di ganti dengan orang baru yaitu Bahtiar Datuk Pado Penghulu, hal itu mungkin juga merupakan pekerjaan Dewan Banteng. Dewan Banteng yang kemudian PRRI, mendapat dukungan dari Masyumi dan PSI, dua partai yang kalah dalam merebutkan kursi di Parlemen Nasional pada pemilihan umum 1955 dari para pemimpin militer yang takut mendapat tindakan disipliner dan dari para pemimpin lokal.

Pada masa pemerintahan Rasidin banyak keluhan-keluhan yang dirasakan dan rasa tidak puas di banyak tempat di Indonesia. Alasan-alasan yang ada adalah terbatasnya kekuasaan pemerintah daerah, kelambanan pemerintah pusat (dengan berkembangnya korupsi dan kabinet yang jatuh bangun), dan rendahnya investasi dalam pembangunan daerah-daerah di Jawa mengingka anti mereka yang besar dalam total pendapatan nasional.

Berdasarkan keluhan yang beragam tersebut membentuk latar belakang reuni bekas Devisi Banteng dari tanggal 21-24 November 1956 di Padang. dalam reuni ini, terbentuklah Dewan Banteng yang di ketuai oleh Ahmad Husein. Pada tanggal 20 Desember 1956, dengan damai Ahmad Husein mengambil alih seluruh tugas dan tanggung jawab dari

⁴⁷ *Ibid.*, h. 4-6

gubernur Ruslan Muljohardjo yang waktu itu menjadi gubernur dari Jawa.⁴⁸

5. Bachtiar Datuk Pado Penghulu

Bachtiar Datuk Pado Penghulu atau di singkat B. Dt. Pado Penghulu yaitu lahir di Payakumbuh dan meninggal di Jakarta pada 18 November 1986 pada saat itu ia berumur 79 tahun. Bachtiar Datuk Pado Penghulu merupakan walikota Padang setelah masa jabatan Rasidin, Bachtiar Datuk Pado Penghulu menjadi walikota pemerintahan yaitu pada tahun 1956 sampai dengan 1958.

Kemudian Bachtiar Datuk Pado Penghulu timbang terima jabatan pada tanggal 12 Januari 1957. Dengan surat ketetapan Gubernur/kepala daerah Provinsi Sumatera Tengah tanggal 13 Desember 1956, No.UP/744/G/56 dan surat ketua dewan daerah Provinsi Sumatera Tengah tanggal 24 Desember 1956 No.4716/Up/b, pada tanggal 26 Desember 1956.⁴⁹

Bachtiar Datuk Pado Penghulu merupakan seorang penghulu yang berasal dari kenegaraan Koto Nan Gadang kota Payakumbuh. Perjalanan karier politiknya dimulai dengan menjadi anggota gementeraad (semacam anggota DPRD kota) di Kota Bukittinggi pada tahun 1935, kemudian ia menjadi anggota Minangkabaurat (semacam DPRD Provinsi) pada tahun 1940. Selanjutnya ia menjadi asisten Demang Tiltang Kamang tahun 1944. Pada tahun 1950 ia dipilih menjadi Bupati Pesisir Selatan Kerinci

⁴⁸ Freek Columbijn, *Op.Cit.*, h. 166-167

⁴⁹ Arsip, Timbang Terima Jabatan, 12 Januari 1957

dan kemudian menjadi Walikota Padang pada tahun 1956 sampai dengan 1958.

Bahtiar Datuk Penghulu menjadi walikota Padang setelah masa pemerintahan Rasidin dan ketika gubernur Ahmad Husein. Ahmad Husein adalah ketua dari Dewan Banteng dari tanggal 21-24 November 1956. Bahtiar Datuk Penghulu di angkat menjadi walikota hal ini mungkin juga merupakan pekerjaan Dewan Banteng. Dewan Banteng yang kemudian bernama PRRI, mendapat dukungan dari Masyumi dan PSI, dua partai yang kalah dalam perebutan kursi di Parlemen Nasional pada pemilihan tahun 1955.

Dewan Banteng memilih sebuah program pembangunan. Dewan menahan pajak (cukai impor) yang seharusnya diserahkan kepada pemerintah pusat dan mengadakan perdagangan barter di Padang ke Singapura. Salah satu kegiatan dari dewan banteng yaitu melakukan perbaikan jalan yang sudah ada dan pembangunan jalan-jalan baru, seiring dengan pembangunan sekolah, mesjid dan pasar. Hal tersebut hampir berhasil menekan korupsi. Dewan banteng mendapat dukungan dari masyarakat karena usaha-usaha perbaikan yang berlangsung dengan cepat. Pemerintah pusat lebih banyak menyediakan dana pembangunan untuk Sumatera Barat.

Pemerintahan Dewan Banteng merupakan periode yang damai untuk Padang, dimana usaha-usaha pembangunan baru dimulai. Namun pendudukan tentara Jawa dan peperangan gerilnya PRRI telah

menimbulkan banyak kekejaman. Hampir seluruh penduduk bersemangat telah mendukung PRRI, banyak pemuda yang ditangkap dan dipenjarakan di stadion, para tahanan diberikan program pendidikan ulang moral dan dibebaskan melalui amnesti pada tanggal 17 Agustus 1961. Setelah masa pemerintahan walikota Bahtiar Datuk Pado penghulu kemudian digantikan oleh Zainal Abidin Sutan Pangeran.⁵⁰

6. Zainul Abidin Sutan Pangeran

Zainul Abidin Pangeran Atau Z. A. S.Pangeran adalah walikota Padang setelah masa pemerintan Bachtiar Datuk Pado Penghulu. Zainul Abidin Pangeran di lantik menjadi walikota Padang yaitu pada tanggal 13 Mei 1958. Namun pada pertengahan tahun 1966, dia di paksa mundur oleh mahasiswa dari jabatannya.

Zainul Abidin Sutan Pangeran di kenal sebagai seorang muslim yang taat. Zainul Abidin Sutan Pangeran menjadi walikota Padang masa masa Demokrasi Terpimpin, yang mana pada saat itu di kenal dengan kekacauan koloninya berakibat dengan pemberontakan 30 September 1965, yang mengubah keseimbangan kekuasaan nasional.

Pada waktu itu angkatan bersenjata mengambil alih kekuasaan dari presiden Sukarno dan partai komunis ditumpas habis. Kemudian jendral Soeharto merampas kekuasaan dan menjadikan dirinya sebagai presiden

⁵⁰ Freck Columbijn, *Op.Cit.*, h. 167-170

terpilih pada bulan Maret 1967. Pada tahun 1969, Indonesia mencapai kestabilan dan pembangunan ekonomi orde baru bermula.⁵¹

7. Drs. Azhari

Drs. H. Azhari yaitu lahir di Parik Putuih, Ampang Gadang, Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Drs. H. Azhari lahir pada 22 Juli 1923 dan meninggal di Padang pada 7 September 1997 yang saat itu berumur 74 tahun. Drs. H. Azhari adalah walikota Padang setelah masa jabatan Zainul Abidin Sutan Pangeran. Pengangkatan Drs. H. Azhari yaitu di mulai memimpin pemerintahan daerah Kota Padang pasca gerakan 30 September dan untuk menggantikan walikota Padang sebelumnya yang di paksa mundur oleh mahasiswa, setelah walikota sebelumnya yaitu Zainul Abidin Sutan Pangeran yang di paksa mundur oleh mahasiswa kemudian kedudukannya diambil alih oleh sekretaris daerah Kota Praja atau yang di kenal dengan Azhari.⁵² Drs. H. Azhari meninggal di Padang di rumah sakit M. Jazuli pada tanggal 7 September 1997 dalam usia 74 tahun.

8. Drs. Akhiroel Yahya

Akhiroel Yahya merupakan walikota Padang setelah Praja Azhari yang meninggalkan jabatannya pada tahun 1967. Akhiroel Yahya juga merupakan seorang perwira angkatan laut. dari laporannya, tugas utamanya adalah memulihkan kestabilan politik dan kedamaian sosial dengan rincian menangani sisa-sisa pemberontak komunis, bekas para

⁵¹ *Ibid.*, h. 170

⁵² *Ibid.*, h. 171

pejabat PRRI, membina hubungan yang akrab antara angkatan bersenjata, pemerintah sipil, penduduk dan mengupayakan kepatuhan Padang yang teguh terhadap pemerintah provinsi dan negara.

Yahya adalah seorang palaksana pemerintahan yang baik dan benar, memiliki semangat yang penuh untuk membangun Padang, dan tidak hanya tertarik kepada urusan stabilitas. Yahya lebih memperhatikan retribusi lokal agar dapat mendukung perencanaannya membangun jalan, perumahan dan areal perkuburan. Yahya mengakui ada sejumlah departemen pemerintah yang belum berjalan dengan lancar. Keterbatasan keuangan dan kekuasaan militer menghambat lepas landas pembangunan.

Pada masa pemerintahan Yahya, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh walikota Padang tersebut seperti melakukan pergantian nama dari orang Tiongkok menjadi warga negara Indonesia. Atau membuat surat pernyataan perpindahan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi warga negara Republik Indonesia.

Akhir dari jabatannya Yahya mengundurkan diri setelah konflik dengan gubernur Sumatera Barat. Kemungkinan konflik ini berkaitan dengan nama arus didahulukan dalam kebijakannya, gubernur menganggap walikota Yahya orangnya terlalu progresif untuk orang-orang sezaman dengannya).

⁵³Arsip Tentang Permintaan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Tiongkok Untuk Kembali Menjadi Warga Negara Republik Indonesia, Tahun 1963

9. Hasan Basri Durin

Hasan Basri Durin atau Drs. Hasan Basri Durin dengan gelar Datuk Rangkayo Mulia Nan Kuniang yaitu lahir di Nagari Jaho, Padang Panjang, Sumatera Barat, 15 Januari 1935 meninggal di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2016 pada umur 81 tahun. Hasan Basri Durin adalah mantan politikus Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai walikota Padang pada tahun 1971 sampai dengan 1983 dan menjadi Gubernur Sumatera Barat masing-masing selama dua periode dan menjadi menteri negara Agraria pada tahun 1998 sampai dengan 1999.

Hasan Basri Durin yaitu lahir dan di besarkan di kampung halamannya nagari Jaho. Jaho adalah sebuah desa atau nagari yang terletak di dekat Kota Padang Panjang. Hasan Basri Durin dulu sekolah di SMA Bukittinggi kemudian ia pindah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Sebelum terjun ke dunia politik, Hasan Basri Durin sempat bekerja sebagai sekretaris panitia pemilihan daerah (PPD) Jambi dan Sumatera Barat. Sedangkan pada bulan Oktober 1971 ia di angkat sebagai pejabat walikota Padang untuk menggantikan Akhiroel Yahya menjadi walikota Padang selama dua periode dari tahun 1973 hingga tahun 1983.

Setelah menjadi walikota Padang, Hasan Basri Durin diangkat menjadi gubernur Sumatera Barat menggantikan Azwa Anas sebagai gubernur Sumatera Barat dan menjabat sampai dengan tahun 1997. Setelah masa pemerintahan Suharto lengser kemudian ia diangkat menjadi menteri

negara Agraria dalam kabinet reformasi pembangunan dan menjabatnya sampai kementerian itu di hapus oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1999.

Karier Hasan Basri Durin yaitu setelah tamat dan meraih gelar Sarjana Muda di Universitas Gadjah mada pada tahun 1958, Hasan Basri Durin segera di tugaskan oleh departemen dalam negeri di Jambi sebagai sekretaris panitia pemilihan daerah (PPD). Setelah bertugas selama dua tahun di Jambi, ia melanjutkan pendidikan tingkat Doktoral di UGM. Pada akhir 1960 ia menyelesaikan studi doktoralnya di UGM, kemudian ia segera ditugaskan kembali di Jambi sebagai sekretaris walikota Jambi.

Untuk memperdalam pengetahuannya di bidang pemerintahan, Hasan Basri Durin di kirim ke Universitas Negeri Wayne di Michigan, Amerika Serikat dari tahun 1962 sampai dengan tahun 1963. Setelah pulang dari Amerika ia dipercaya menjadi pejabat walikota Jambi (1966-1968) saat usianya waktu itu baru mencapai 61 tahun. Namun, suasana-suasana politik di Jambi waktu itu menyebabkan ia harus pergi dan meninggalkan daerah itu.

Namun pada tahun 1970 ia menjabat sebagai sekretaris PPD Sumatera Barat. Pada tahun 1971 ia diangkat sebagai pejabat walikota Padang, yang kemudian mengantarkannya menjadi walikota Padang dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1983. Setelah empat tahun berikutnya ia menjabat sebagai pembantu gubernur Sumatera Barat wilayah II sebelum kemudian di pilih sebagai gubernur Sumatera Barat selama dua periode

(1987-1997), menggantikan Azwar Anas yang sebelumnya juga telah menjabat selama dua periode.

Setelah turun dari jabatannya Hasan Basri Durin kemudian ia terpilih menjadi fraksi utusan daerah MP-RI (1997), setelah itu ia diangkat menjadi menteri negara Agraria dalam kabinet reformasi pembangunan yang waktu itu di pimpin oleh B.J. Habibie. Pada saat itu , politik Indonesia sedang berada diawal pusaran badai reformasi yang kemudian berhasil melengserkan Suharto dari kursi kepresidenan dan akhirnya menumbangkan rezim orde baru. Sementara B.J. Habibie yang menggantikan Suharto tidak berhasil mengendalikan kapal politik Indonesia yang sedang oleng atau sedang tidak aman.

Karena kondisi seperti itu juga berimbas kepada Hasan Basri Durin, karena banyaknya fitnah-fitnah korupsi yang dilemparkan kepadanya selama menjabat sebagai gubernur Sumatera Barat. Akibat kondisi yang demikian juga mengakibatkan insiden penyanderaan pada dirinya dalam bus ketika mengunjungi kampus IKIP atau kampus Universitas Negeri Padang (saat ini) pada tahun 27 Agustus 1998.

Hasan Basri Durin meninggal dunia karena pendarahan otak pada hari sabtu 9 Juli 2016, pukul 00.30 WIB di kediamannya Pancoran Jakarta Selatan. Hasan Basri Durin meninggalkan empat orang anak dan sebalas cucu. Hasan Basri Durin di makamkan di taman makam pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

10. Syahrul Ujud SH

Syahrul Ujud adalah walikota Padang setelah Hasan Basri Durin. Syahrul Ujud adalah seorang jaksa yang kemudian menjadi walikota Padang selama dua periode. Masa pemerintahan walikota Padang yaitu pada tahun 1983 sampai dengan 1993 pada masa pemerintahan Suharto. Selain sebagai seorang jaksa Syahrul Ujud juga pernah mengemban tugas sebagai ketua DPD KNPI Sumatera Barat pada periode 1979-1982, serta pimpinan DPD Golkar Tingkat II Padang dan sebagai kepala kantor sosial politik Kota Madya Padang dari tahun 1977-1988.⁵⁴

Selama menjadi walikota Padang Syahrul Ujud sudah pasti mendapat permasalahan, baik itu permasalahan mengenai perencanaan kota, mengenai perkotaan (prasarana jalan dan jembatan, saluran pembangunan air limbah, prasarana listrik, air bersih, sarana perdagangan dan pedagang kaki lima), masalah pemerintahan, pembinaan masyarakat, masalah sosial dan lainnya dan fasilitas pelayanan sosial seperti (pendidikan, kebudayaan, generasi muda dan olahraga, kesehatan, agama dan pembinaan pembangunan).

Dengan berbagai macam permasalahan yang ada di Kota Padang Syahrul Ujud berhasil menjalankan program yang di rencanakannya dengan baik. Walaupun tidak semua program yang di rancang tidak berhasil karena beberapa kendala atau permasalahan yang banyak sehingga ada program-program yang tidak dijalankan. Adanya program yang tidak

⁵⁴ Memori Pelaksanaan Tugas Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Padang H. Syahrul Ujud, S.H, 1983-1988, Perkembangan Kota Padang. h. 21

terjalankan bukan berarti pada masa pemerintahan Syahrul Ujud ia tidak menyelesaikan banyak program, namun banyak juga program-program yang dilakukan oleh Syahrul Ujud dalam 5 tahun pemerintahannya.⁵⁵

Berbagai kebijakan dasar yang diambil oleh pemerintah Kota Padang baik itu dalam memecahkan masalah yang dihadapi maupun dalam melanjutkan usaha-usaha pembangunan, maka selama lima tahun menjabat pemerintah kota Padang Syahrul Ujud telah banyak mendapatkan hasil. Keberhasilan yang ia lakukan adalah mengenai;

1. Produk-produk perencanaan kota

Mengenai pedoman perencanaan fisik dan tata ruang Syahrul Ujud berhasil menyusun buku rencana induk kota (RIK) atau *Master Plan* tahun 1983-2003 yang merupakan pedoman dalam kebijakan tata ruang kota untuk jangka panjang. *Master Plan* ini telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 1983 yang kemudian disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 650-1400 tanggal 3 Oktober 1983. Berdasarkan *Master Plan* tersebut Syahrul Ujud juga berhasil pula menyusun buku rencana bagian wilayah kota (RBWK) atau di sebut juga dengan rencana detail tata ruang kota (RD/TRK).

2. Perluasan dan peningkatan kualitas jalan, jembatan dan riol

Dalam masa jabatan selama lima tahun Syahrul Ujud telah berhasil membangun dan meningkatkan prasarana jalan, jembatan dan

⁵⁵ *Ibid.*, h. 22-38

riol dengan memanfaatkan dana anggaran dan mendorong partisipasi masyarakat. Keberhasilan Syahrul Ujud sebagai walikota Padang yaitu telah berhasil meningkatkan kualitas jalan dan panjang jalan, penambahan jaringan jalan, pembukaan jalan ke arah terisolir dan jalan-jalan lingkungan maupun untuk mendorong aktifitas kepariwisata.

Syahrul Ujud juga telah meningkatkan dan membangun jembatan beton, semi permanen maupun jembatan pemhubung antar daerah. Demikian juga riol-riol lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Penambahan pelayaran listrik, air minum dan telepon

a. Prasarana listrik

Hasil yang telah di capai pada masa pemerintahan Syahrul Ujud yaitu telah berhasil meningkatkan produksi tenaga listrik dari

tahun 1983 sampai dengan 1987. Seperti yang dituliskan dibawah ini;
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

No	Fasilitas listrik	Tahun 1983	Tahun 1987
1.	Produksi (000 Kwh)	167.833	175.498
2.	Jumlah langganan	41.472	47.335
3.	Rumah tangga (KK)	76.440	96.633

Dari tabel di atas produksi tenaga listrik tahun 1987 meningkat sebanyak 4,57% dari produksi tahun 1983. Begitu juga

dengan jumlah langganan dan rumah tangga. Pada tahun 1987 selalu mengalami peningkatan dari tahun 1983.

b. Pelayanan air minum

Hasil yang dicapai dengan perencanaan pelayanan air minum telah memberikan hasil yang nyata, baik dalam bentuk peningkatan produksi maupun dalam peningkatan konsumsi air minum oleh penduduk.

c. Pembangunan sarana perdagangan

Mengenai pembangunan sarana perdagangan hasil-hasil yang telah di capai yaitu pembangunan Pasar Lubuk Buaya (Kecamatan Koto Tengah), pembangunan Pasar Bandar Buat (Kecamatan Lubuk Kilangan), pembangunan Pasar Siteba (Kecamatan Nagalo), pembangunan Pasar Raya Timur, pembangunan perkotaan Pasar Raya Barat, dan pembangunan los

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG**

4. Fasilitas pelayanan sosial

a. Fasilitas kebudayaan

Selama periode lima tahun sebagai walikota padang, Syahrul Ujud telah berhasil membangun berbagai fasilitas kebudayaan seperti pembangunan Taman Budaya Padang, pembangunan Museum Aditya Warman, pemugaran gedung pertemuan Bgd. Aziz Chan dan pembangunan gedung Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa, pemugaran gedung juang angkatan 45

Kotamadya Padang yang terletak di jalan Pasar Mudik Kota Padang, pembangunan tugu-tugu dan monumen-monumen perjuangan rakyat Kota Padang di berbagai tempat yang mengandung peristiwa heroik, pembangun medan nan bapaneh dan kesenian lainnya, dan fasilitas kebudayaan seperti pembinaan group randai, rabana salun dan sebagainya.

b. Agama

Fasilitas keagamaan telah banyak di bangun berbagai fasilitas keagamaan dalam periode lima tahun. Hasil-hasil yang di capai dapat dilihat pada tabel di bawah;

Perkembangan Fasilitas Keagamaan di Kota Padang 1983/84-

1987/88 (unit)

No	Tahun	Mesjid	Mushallah	Gereja	Kelenteng/pura
1.	1983/84	217	520	8	2
2.	1984/85	234	529	8	2
3.	1985/86	246	510	8	2
4.	1986/87	261	522	8	2
5.	1987/88	265	561	8	2

Mesjid telah bertambah sebanyak 48 buah dan mushallah 41 buah. Disamping itu telah dilakukan pemugaran dan perluasan gereja, mushallah dan kelenteng, dengan demikian kini telah dapat

di sediakan rata-rata 1 mesjid dan 3 mushallah untuk setiap kelurahan.

Pada masa pemerintahan Syahrul Ujud selama lima tahun telah banyak melakukan berbagai perubahan dan banyak melakukan peningkatan berbagai fasilitas-fasilitas di Kota Padang. Banyaknya program yang dilakukan oleh Syahrul Ujud banyak yang berhasil.

Perencanaan yang tidak berhasil yaitu karena masalah transportasi dan lalu lintas, masalah banjir, masalah disiplin sosial, keuangan daerah, penyediaan tanah dan pembebasan tanah, masalah angkatan kerja dan sektor informal, rencana proyek-proyek strategis, dan pembangunan objek-objek wisata.⁵⁶

11. Zuiyen Rais

Zuiyen Rais atau Drs. H. Zuiyen Rais 13 Desember 1940. Zuiyen Rais adalah walikota Padang setelah walikota Syahrul Ujud, SH. Sebelum terpilih sebagai walikota Padang, Zuiyen adalah sekretaris daerah Padang di penghujung jabatan Syahrul Ujud di tingkat pada sebagai pelaksana tugas harian walikota Padang.

Perjalanan karier Zuiyen Rais diawali sebagai asisten dosen di IKIP Padang pada tahun 1963, kemudian asisten ahli pada tahun 1968 dan pada tahun 1970 hijrah ke lingkungan departemen dalam negeri dengan status BPH Kota Padang. Selanjutnya pada tahun 1974 di percaya sebagai ketua TEPPEDA dan ketua BAPPEDA Padang pada tahun 1983. Perjalan

⁵⁶ Perkembangan Kota Padang, *Op.Cit.*, h. 91-102

karier Zuiyen terus menanjak yang di tandai dengan dipercayanya sebagai asisten ekbang kesra. Sebelum di angkat sebagai sekretaris daerah Kota Padang tahun 1992. Zuiyen Rais pernah menjabat kabid Sosbud Bappeda Sumbar.

Pendidikan yang di tempuh oleh Zuiyen Rais adalah SD, SMP, dan SMA di jalani di Bukittinggi dan setelah tamat di IKIP Padang Zuiyen mengambil pasca di IPB Bogor. Gelar MS di sandangnya sejak tahun 1986. Riwayat pengangkatan Zuiyen dimulai sebagai asisten dosen (11 April 1956), asisten ahli dengan pangkat III/a (12 Juli 1968), penata muda TK I (III/b), 1 April 1974, penata tata peraja tahun 1978, penata tata praja TK I (III/d) sejak 1 April 1982, terhitung sejak 1 Oktober 1984 di naikkan pangkatnya menjadi IV/a (pembina), pembina tingkat I (IV/b) tahun 1988 dan pembina utama Madya (IV/c) tahun 1992 dan terakhir dengan pangkat pembina utama Madya (IV/ d) sejak tahun 1996.⁵⁷

Walaupun melondong dari kota dia, namun Zuiyen tidak pernah meninggalkan pendidikan. Hal tersebut terbukti sampai sekarang dia masih tetap mengelola sebuah yayasan pendidikan bernama Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara dengan Universitas Bung Hatta yang terbilang sukses sampai sekarang.

Pada masa walikota Padang Zuiyen Rais pengembangan kawasan kota lama yang terletak di seputaran Pondok dan Muaro terus ditingkatkan. Dalam sejarah masa lalunya (abad 16) tempat ini merupakan

⁵⁷ Dinas Informasi dan Dokumentasi Kota Padang, *Potret 10 Tahun Bersama Walikota Padang Drs. H. Zulyen Rais*, MS 1993-2003, h. 18-19

salah satu pusat perdagangan dan pelabuhan utama wilayah Indonesia bagian Barat. Bangunan-bangunan tua di sekitar kawasan ini sarat dengan arsitektur Eropa dan Cina. Pemerintah Belanda pada masa lalunya menjadikan kawasan ini sebagai pusat perdagangan, yang secara kronologis administratif di tetapkan pada tanggal 20 Mei 1784. Pelabuhan Muaro yang terletak dikawasan kota lama ini berada di jalan Batang Arau yang dulu dikenal dengan nama jalan “*Promenade*”.

Sebelum dibukanya Pelabuhan Teluk Bayur (1892) pelabuhan Muaro merupakan tempat bersandarnya perahu-perahu dan kapal layar kecil maupun tongkang-tongkang yang mengantarkan muatan ke kapal samudera yang berlabuh di belakang pulau Pisang Gadang.⁵⁸

12. Fauzi Bahar

Fauzi Bahar atau Dr. H. Fauzi Bahar, M. Si. dengan gelar Datuk Nan Sati lahir di Padang, Sumatera Barat 16 Agustus 1962. Pada umur 56 tahun, adalah seorang tokoh politikus yang pernah menjadi walikota Padang Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Fauzi Bahar di pilih menjadi walikota pada tahun 2004 melalui sistem perwakilan di DPRD Kota Padang. Kemudian pada tahun 2009, ia terpilih kembali untuk masa jabatan untuk kedua kalinya sebagai walikota Padang dalam pemilihan langsung.

Latar belakang dari Fauzi Bahar adalah seorang militer. Fauzi Bahar mengawali kariernya dibidang militer, pasukan elit TNI Al

⁵⁸ *Ibid.*, h. 24

Komando Pasukan Katak (Kopaska), dengan pangkat terakhir letnan Kolonel laut. latar belakang sebagai seorang militer tidak menutup kemungkinan kalau Fauzi Bahar bisa menata Kota Padang. bahkan Fauzi Bahar berhasil melanjutkan perencanaan-perencanaan yang dilakukan oleh walikota sebelumnya.

Pada masa pemerintahan Fauzi Bahar banyak program yang dijalankan pada masanya. Program yang dijalankan pada masa Fauzi Bahar yaitu;

1. Mendatangi sekolah-sekolah dan memberi ceramah pada sekolah-sekolah tersebut
2. Pada setiap bulan ramadhan Fauzi Bahar mewajibkan setiap sekolah untuk mengikuti pesantren ramadhan, karena dalam pesantren ramadhan anak-anak sekolah bisa mendapatkan ajaran-ajaran agama Islam
3. Setelah menjadi walikota Padang Fauzi Bahar telah menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan di mesjid dan surau serta menyemarakkan lagi kegiatan didikan subuh bagi anak-anak. Tidak hanya kegiatan untuk anak-anak tetapi Fauzi Bahar juga menciptakan kegiatan untuk ibu rumah tangga seperti majelis taqlim
4. Pada masa pemerintahan Fauzi Bahar juga mengadakan suatu program budaya busana muslim (berjilbab) bagi siswa-siswa mulai dari SD, SMP, dan SMA di Kota Padang. dan kewajiban ini hanya berlaku



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG**

untuk siswi muslim sedangkan yang non muslim cukup menyesuaikan dengan pakaian yang menutup aurat

5. Selain itu melakukan perang terhadap segala bentuk maksiat merupakan tekad awal dalam membangun Kota Padang sejak di percaya memerintah Kota Padang tercinta.⁵⁹

Setelah menjadi walikota Padang, hampir selama lima tahun kepemimpinannya, Fauzi Bahas telah berhasil menegakkan lima pilar moral yaitu memberantas judi, busana muslim dengan memakai jilbab bagi wanita dan mengembangkan penghafalan Asma'ul Husna (nama-nama Allah). Perjuangan yang lain adalah mewujudkan mantan walikota Padang Bagindo Aziz Chan dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional, yang merupakan suatu keinginan yang sudah lama di impikan oleh masyarakat kota ini.⁶⁰

Untuk memberantas judi di Kota Padang pemerintah Kota Padang mengeluarkan larangan perjudian termasuk Togel, enam bulan kemudian, pemerintah pusat melalui kaperni Susanto melarang seluruh macam perjudian. Sedangkan dalam Busana Muslim, pemerintah Kota Padang mengeluarkan kebijakan untuk berpenampilan islami, terutama bagi ibuk-ibuk dan anak perempuan dan mereka yang bekerja di kantor pemerintahan dan sekolah-sekolah.

⁵⁹ Azwar Siry, *Tiga Tahun Kota Padang Kepemimpinan Walikota Fauzi Bahar*, Yusman Kasim, Padang: Badan Kominfo Kota Padang, 2007, h. 16

⁶⁰ Majalah TITIAN UTAMA, *Pembangunan Kota Padang Dengan Tiga Pilar*, 2008, Moral, h. 4

Pada masa jabatannya sebagai walikota Padang tentu Fauzi Bahar memiliki visi dan misi serta program kerja. Visi misi Fauzi Bahar sebagai walikota Padang yang di dampingi oleh Mahyeldi Ansyarullah yaitu, visi “terwujudnya Kota Padang yang religius, aman dan sejahtera”. Sedangkan misinya yaitu, membangun karakter dan suasana kehidupan beragama yang mengacu kepada nilai-nilai Adat Basandi Syarak (ABS) Syarak Basandi Kitabullah (SBK), mewujudkan Kota Padang yang aman dan tertib, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (berkelanjutan, terdistribusi merata, dan berpihak pada rakyat).

Selain memiliki visi dan misi Fauzi Bahar juga memiliki program bersama Mahyeldi Ansyarullah yang mana program kerjanya tersebut;

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pembinaan keagamaan bagi aparat, masyarakat dan generasi muda.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pembinaan seni budaya islami, adat minangkabau dalam ABS SBK
- c. Meningkatkan penataan lingkungan, pasar dan tertib lalu lintas
- d. Meningkatkan rasa aman melalui peningkatan peran masyarakat, trantib dan pemberantasan penyakit masyarakat
- e. Meningkatkan pengelolaan pariwisata, perikanan, industri, dan pertanian untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2013 sekitar 16 persen dan pendapatan perkapita penduduk Rp 12.000.000

- f. Meningkatkan pengembangan daerah pinggiran sebagai pusat perekonomian baru
- g. Meningkatkan sarana dan fasilitas umum untuk menunjang tumbuh kembangnya perekonomian di pinggiran.⁶¹

Sedangkan masa pemerintahan Fauzi Bahar dengan wakilnya Yusman Kasim telah melakukan berbagai program kegiatan pembangunan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada warga Kota Padang dengan tetap mengacu kepada agenda pembangunan daerah kota Padang tahun 2004-2008 dengan empat agenda pembangunan yaitu meningkatkan pembangunan sosial budaya, meningkatkan administrasi pemerintah dan pelayanan umum, meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan pembangunan fisik lingkungan.⁶²

13. Mahyeldi Ansharullah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG**

Mahyeldi Ansharullah, SP dengan gelar Datuk Marajo (lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, lahir pada 25 Desember 1966). Mahyeldi adalah seorang mubaliq dan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat ini menjabat sebagai walikota Padang. Mahyeldi adalah seorang anak dari buruh angkut, dan harus bekerja sambil sekolah demi membantu

⁶¹ Periode 2009-2014 Tahun Kepemimpinan Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang (Fauzi Bahar dan Mahyeldi Ansyarullah), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, h. 19

⁶² Tahun Ke 5 Kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Padang Fauzi Bahar dan Yusman Kasim, Dinas Komunikasi dan Informatika Padang, h. 15

orang tua. Ia berkecimpung dalam pergerakan islam waktu kuliah di Universitas Andalas sambil turun ke masyarakat sebagai mubalig.

Partai PKS mencalonkan Mahyeldi sebagai anggota DPRD Sumatera Barat pada pemilihan umum legislatif 2004 dan terpilih dengan peolehan suara terbanyak. Mahyeldi menjabat sebagai wakil ketua DPRD Sumatera Barat periode 2004-2009 sebelum maju sebagai wakil walikota Fauzi Bahar untuk periode 2009-2014.

Pada masa pemerintahan Mahyeldi, walikota Padang Mahyeldi lebih memfokuskan kepada tiga sektor pengembangan yaitu pendidikan, perdagangan dan pariwisata. Sedangkan visi dan misi walikota Padang yaitu mewujudkan masyarakat yang madani, unggul, serta berdaya saing yang tinggi, dan dalam mewujudkan visi dan misi tersebut Mahyeldi lebih memfokuskan kepada tiga sektor pengembangan tersebut.

Untuk pengembangan dalam bidang pendidikan pemerintah setempat telah menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan siswa, termasuk ekstra kurikuler bahasa Inggris yang sekaligus akan mendukung pengembangan dalam sektor pariwisata.

Sedangkan dalam sektor perdagangan, Mahyeldi melakukan perbaikan infrastruktur pasar raya, pasar tradisional, dan infrastruktur penunjang kegiatan perdagangan lainnya. Gedung yang di bangun untuk para pedagang di pasar di bangun dengan sangat madani, bersih dan masyarakat merasa nyaman untuk belanja, selain itu pemerintah Kota

Padang juga melakukan pembenahan pelabuhan perdagangan luar negeri, serta membuka akses lebih luas ke manca negara.

Pada sektor pengembangan wisata, walikota Padang melakukan perbaikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata dan mempercantik berbagai objek wisata yang ada di kota Padang, contoh perbaikan dalam sektor wisata yaitu dapat dilihat dari pengembangan Pantai Panjang, Jembatan Siti Nurbaya, Gunung Padang, Pantai Air Manis, kawasan Arau dan Kota Tua Padang.⁶³



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG**

⁶³<http://m.bisnis.com/Sumatera/read/bangun-kota-berkelas-dunia-pemkot-padang-fokus-tiga-sektor-ini>, diakses 3 Mei 2019, Pukul 20:25